



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 821 /BAPPERIDA/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2026-2030 KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi dan dapat berkembang secara optimal dan efektif, perlu upaya dari pemerintah daerah melalui kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan daerah responsif terhadap kebutuhan anak;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal dan aspek sosial budaya serta ekonomi, yang disusun dalam rencana aksi daerah (RAD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2026-2030 Kabupaten Bengkayang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5006);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
- 12.. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah 2 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam penyusunan RAD Kabupaten Layak Anak (KLA) mempertimbangkan RPMJD, Renstra, Visi- Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berintegrasi dengan Perangkat Daerah.
- KETIGA : RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada Diktuum KESATU adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam memantau dan mengevaluasi program

kegiatan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di tingkat kabupaten Bengkayang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 51/BAPPEDA/Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2023-2026 Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN:

1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Inspektur Kab. Bengkayang;
3. Manager Wahana Visi Indonesia Prov. Kalbar di Pontianak.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 821 /BENGKAYANG/TAHUN 2025
TANGGAL : 23 Desember 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2026-
2030 KABUPATEN BENGKAYANG

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2026 - 2030

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2025	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
I KELEMBAGAAN													
1	Peraturan Daerah (Perda) tentang KLA	Fasilitasi penyusunan Perda KLA	Jumlah peraturan daerah	Peraturan/ kebijakan	Peraturan Daerah	2	2	2	2		2	DPPKBP3A dan Bagian Hukum Setda	Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan/atau Perlindungan Hak Anak (PKA)
			Jumlah Peraturan Bupati	Peraturan/ kebijakan	peraturan bupati	-	-	1	1		1	DPPKBP3A dan Bagian Hukum	PHA dan/atau PKA
			Jumlah keputusan bupati	Keputusan	keputusan bupati	3	3	3	3		3	DPPKBP3A dan Bagian Hukum	PHA dan/atau PKA
			Jumlah instruksi bupati	Instruksi	instruksi bupati	-	-	1	1		1	DPPKBP3A dan Bagian Hukum	PHA dan/atau PKA
			Jumlah surat edaran bupati	Surat Edaran	surat edaran bupati	-	-	1	1		1	DPPKBP3A dan Bagian Hukum	PHA dan/atau PKA
2	Penguatan kelembagaan KLA	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator; kelembagaan dan klaster GT KLA	Bimbingan Teknis	Jumlah kegiatan	-	-	1	1		1	BAPELBANGDA / DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA

		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	RAD KLA yang Terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	RAD KLA	1	1	1	1		1	BAPELBANGDA / DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Pembaharuan Profil KLA	Profil KLA dan diperbaharui secara berkala	Dokumen	Profil KLA	-	-	1	1		1	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Pembentukan dan penguatan Fasilitator KLA	Jumlah Fasilitator KLA	OPD, Kecamatan, Desa/ Kelurahan	Fasilitator KLA	63	63	75	75		85	BAPELBANGDA / DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket	Materi KIE KLA	7	7	8	8		9	DISHUB / DISKOMINFO	Informasi dan Komunikasi Publik
		Penguatan Indikator KLA	Jumlah kegiatan	Indikator	Kegiatan	14	14	15	16		16	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Fasilitasi Pemberdayaan Anak di Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan Ramah Anak)	Jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan Ramah Anak)	Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan	6	12	24	48		96	BAPELBANGDA /DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Pelatihan bagi SDM PATBM tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual anak melalui media online	Jumlah SDM PATBM yang terlatih Perlindungan Anak	Orang	SDM PATBM	-	-	60	72		84	BAPELBANGDA / DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA

3	Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten	APSAI aktif	Asosiasi	Lembaga APSAI	-	1	1	1		1	BAPELBANGDA / DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Penguatan pelembagaan PUHA bagi forum lembaga profesi	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan PUG dan PUHA	SDM Lembaga	Lembaga Profesi	-	-	1	2		3	BAPELBANGDA / DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jaringan Media Peduli Anak aktif	Jaringan	Media	38	38	38	38		38	DISKOMINFO dan Bagian Protokol dan Kopimda Setda	Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Penguatan pelembagaan PUHA bagi Media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	Media	-	-	17	17		17	Bagian Protokol dan Kopimda Setda	Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi keagamaan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	Jumlah SDM	4	6	8	10		12	KEMENAG	Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga	Lembaga	11	11	11	14		14	KEMENAG	Pemenuhan Hak Anak (PHA)

		Penguatan pelebagaan Pengarusutama- an Hak Anak (PUHA) bagi organisasi kemasyarakatan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi kemasyarakatan yang mendapat penguatan pelebagaan PUHA	SDM	Jumlah SDM	4	8	12	16		20	BAKESBANGPOL	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Penguatan pelebagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah lembaga Kemasyarakatan	Lembaga	Jumlah Lembaga	1	2	3	4		5	BAKESBANGPOL	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan pelebagaan PUHA	SDM	Jumlah SDM	10	20	30	50		75	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
			Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset	Lembaga	Jumlah Lembaga	1	2	3	3		3	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA

		Penguatan Peran PKK melalui 10 Program Pokok PKK (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Beroperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup serta Perencanaan Sehat)	Jumlah Program/ Panduan 10 Program Pokok PKK untuk Diimplementasi kan menjadi program Desa/ Kelurahan Layak Anak	Dokumen Laporan	Program Pokok PKK	7	9	11	13		15	DPMD	Pengelolaan Kecamatan
		Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial	Jumlah Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di Luar Panti Sosial	Lembaga	Surat Keputusan	-	1	1	1		1	DINSOS	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota

II	KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN												
4	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Persentase %	Akta Kelahiran	96,6	97	98	100		100	DISDUKCAPIL	Pencatatan Sipil
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA	Kecamatan Desa/ Kelurahan	KIA	40	50	60	70		80	DISDUKCAPIL	Pencatatan Sipil
		Sosialisasi dan advokasi kebiiaan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Kecamatan/ desa/ kelurahan tersosialisasikan kebijakan pemenuhan hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	Jumlah Peserta Sosialisasi	300	300	300	300		300	DISDUKCAPIL	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Penyelenggaraa n sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Persentase Konten internet bermuatan negatif yang ditangani	Persentase %	Konten Internet	100	100	100	100		100	DISKOMINFO	Informasi dan Komunikasi Publik
		Penyebaran Infomasi Layak Anak	Jumlah Konten Informasi Layak Anak yang tersebar melalui Forum Anak	Eksemplar (Produk Konten cetak, digital)	Konten	2	2	2	2		2	DISKOMINFO	Informasi dan Komunikasi Publik
				Buku Cetak	Buku	36560	38000	38500	39000		39500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan Bahan Pustaka

				Buku Digital	File	33230	33600	34000	34500		35000	Dinas Perpustakaan dan	Pengembangan Bahan Pustaka
			Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui Media <i>below theline</i>	Judul (Konten Youtube)	Konten	12	14	16	18		20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan Bahan Pustaka
				Kegiatan	Dokumen Sosialisasi	5	5	5	5		5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
		Fasilitasi pemenuhan hak Anak atas ILA	Jumlah daerah/wilayah yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA	Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	Jumlah Wilayah	6	12	24	48		96	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Jumlah Pusat Informasi	PISA	1	1	1	1		1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten memiliki layanan perpustakaan anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	Perpustakaan Kabupaten Kecamatan /Desa/ Kelurahan	Jumlah Perpustakaan	2	3	4	5		6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.

			Mobil Perpustakaan Keliling	Jumlah Mobil Perpustakaan keliling	2	2	2	2		2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
		Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Kegiatan	Jumlah kegiatan	7	8	8	8		8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
		Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh anak	%	Jumlah Anak	52	55	60	75		80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
		Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan Kabupaten	Tempat Layanan Perpustakaan berbasis	1	1	1	1		1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
			Perpustakaan Desa/ Kelurahan	Tempat Layanan Perpustakaan	2	3	4	5		6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
			Mobil Perpustakaan Keliling	Jumlah Mobil Perpustakaan keliling berbasis	2	2	2	2		2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
			Pojok Baca Digital	Pojok Baca Digital Berbasis Inklusi	1	2	3	4		5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
		Jumlah Pojok Baca Digital area publik di Kabupaten/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	Pojok Baca Digital	Pojok Baca Digital area publik	40	40	40	40		40	DISKOMINFO	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.

6	Pelebagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki FA aktif	Kecamatan Desa/ Kelurahan	Forum Anak	12	12	12	72		180	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah anak anggota FA sebagai 2P	FA Kabupaten/ FA Kecamatan FA Desa/ Kelurahan	Forum Anak	13	13	13	73		180	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi FA	Jumlah anak menerapkan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)	Anak	Forum Anak	200	200	200	200		200	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Penguatan kapasitas Fasilitator Forum Anak	Jumlah Fasilitator Forum Anak terlatih	Kabupaten/ Kecamatan Desa/ Kelurahan	Fasilitator Forum Anak	13	13	13	13		25	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
III	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF												
7	Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	Orang	Perkawinan Anak	127	150	100	80		60	Pengadilan Agama	Pembinaan Keluarga dan Perkawinan
		Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan Anak	Kecamatan	Perkawinan Anak	12	12	12	12		12	Pengadilan Agama	Pembinaan Keluarga dan Perkawinan

		Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka Sakinah/islam	Pasangan	Pembinaan bagi keluarga	-	-	-	5		8	DPPKBP3A dan/atau KEMENAG	Pembinaan Keluarga dan Perkawinan
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan kristiani	Pasangan	Pembinaan bagi keluarga	-	-	-	1		2	DPPKBP3A dan/atau KEMENAG	Pembinaan Keluarga dan Perkawinan
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia	Pasangan	Pembinaan bagi keluarga	-	-	-	1		2	DPPKBP3A dan/atau KEMENAG	Pembinaan Keluarga dan Perkawinan
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya/Budha	Pasangan	Pembinaan bagi keluarga	-	-	-	1		2	DPPKBP3A dan/atau KEMENAG	Pembinaan Keluarga dan Perkawinan
8	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka Sakinah	Pasangan	Pembinaan bagi keluarga	-	-	-	5		8	DPPKBP3A dan/atau KEMENAG	Pembinaan Keluarga dan Perkawinan
			Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	Kecamatan	Pembinaan bagi keluarga	6	8	10	12		12	DPPKBP3A	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

		Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan Anak	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Lembaga	Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)	1	2	3	4		5	DINAS SOSIAL	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
		Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	Persentase %	pembinaan keluarga balita dan Anak	70	75	80	85		85	DPPKBP3A	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			Jumlah keluarga yang memiliki baduta pada lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam Pencegahan Stunting	Keluarga	pembinaan keluarga balita dan Anak	17798	18688	19622	20603		21634	DPPKBP3A	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	Persentase %	pembinaan keluarga balita dan Anak	70	75	80	85		85	DPPKBP3A	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

		Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang Mengakses PPKS	Keluarga	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	50	100	150	200		250	DPPKBP3A	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Persentase %	Pendidikan Dasar	100	100	100	100		100	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Persentase %	Pendidikan Dasar	99	99	99	99		99	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	Penguatan Karakter Satuan Pendidikan	79	85	105	125		150	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	Penguatan Karakter Satuan Pendidikan	60	70	100	100		100	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

			Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	Penguatan Karakter Satuan Pendidikan	78	78	78	78		78	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan yang melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Kecamatan	Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	12	12	12	12		12	DPPKBP3A	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Orientasi Bina Keluarga Balita				12	12	12	12		12	DPPKBP3A	pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
9	Pengembang- an Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD- HI)	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Persentase %	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	70	80	90	90		95	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	Persentase %	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	70	80	90	90		95	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	Buku Induk LKSA	3	4	5	6		7	DINSOS	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga	TAS yang terakreditasi	-	-	-	1		1	DINSOS	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Pelaksanaan standarisasi <i>Daycare</i> ramah Anak	Jumlah <i>Daycare</i> ramah Anak	Lembaga	<i>Daycare</i> ramah anak	-	-	5	10		15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
		Penguatan Kapasitas Pesantren dalam memberikan Pengasuhan Alternatif bagi Santri/wati	Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	Pesantren Ramah Anak	Jumlah Pesantren	-	2	4	6		8	DISDIKBUD KEMENAG PENG. AGAMA	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah model pesantren ramah Anak	Model Pesantren	Jumlah Pesantren	-	2	4	6		8	DISDIKBUD KEMENAG PENG. AGAMA	Pengelolaan Pendidikan

			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis Hak Anak	Pengasuh Pesantren	Jumlah Pengasuh Pesantren	-	2	4	6		8	DISDIKBUD KEMENAG PENG. AGAMA	Pengelolaan Pendidikan
11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak	RBRA	Jumlah RBRA	50	60	70	80		90	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Standardisasi Ruang Bermain Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak	RBRA	Jumlah Standardisasi RBRA	10	20	30	40		50	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	Unit	Bus Sekolah	-	-	1	1		2	DISHUB	Penyelenggara- an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk	lokasi	ZoSS	17	22	25	30		35	DISHUB	Penyelenggara- an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
IV	KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN												
12	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase %	Jumlah Ibu Melahirkan	100	100	100	100		100	DKK	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Skrining deteksi dini pra persalinan	Persentase kunjungan neonatal	Persentase %	Jumlah Ibu Hamil	100	100	100	100		100	DKK	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

			Cakupan ibu hamil diskriming HIV dan Sifilis	Persentase %	Jumlah Ibu Hamil	100	100	100	100		100	DKK	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Cakupan Ibu Hamil diskriming hepatitis B	Persentase %	Jumlah Ibu Hamil	100	100	100	100		100	DKK	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
13	Status Gizi Balita	Suplementasi vitamin A pada Balita	Persentase Balita Usia 6-59 Bulan mendapatkan vitamin A	Persentase %	Jumlah Balita	100	100	100	100		100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Persentase %	Jumlah Balita	100	100	100	100		100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pelatihan bagi FA sebagai 2P dalam Gizi	Jumlah daerah yang memiliki FA 2P Gizi	FA Kabupaten/ FA Kecamatan FA Desa/ Kel.	Jumlah FA	13	25	37	49		61	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pelatihan bagi Forum Keluarga dalam 2P Gizi	Jumlah daerah yang memiliki FK2P Gizi	FK Kabupaten/ FK Kecamatan FK Desa/ Kel.	Jumlah FK	13	25	37	49		61	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia	Peningkatan gizi Anak di bawah usia dua tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	Persentase %	Bayi	100	100	100	100		100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi

	di Bawah 2 Tahun	Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif	Jumlah kecamatan, desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan stunting melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	12	12	12	12		12	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar	Persentase %	Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama	100	100	100	100		100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
			Persentase rumah sakit terakreditasi	Persentase %	Rumah Sakit	100	100	100	100		100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pelayanan Kesehatan Bayi/Anak dari Ibu terinfeksi HIV, dan Sifilis	Persentase Kecamatan Mampu Profilaksis	Persentase %	Jumlah Kecamatan	100	100	100	100		100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pemutusan penularan Hepatitis B dari Ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari Ibu dengan HBsAg reaktif diberi HBO dan HBIg kurang dari ≤24 jam setelah kelahiran	Persentase %	Data Bayi Lahir	100	100	100	100		100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Theraphy pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase Balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT	Persentase %	Balita	100	100	100	100		100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi

		Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase Kabupaten yang 50% Puskesmas melakukan tata laksana standar pneumonia	Persentase %	Jumlah Puskesmas	100	100	100	100		100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	Persentase %	Jumlah Balita	100	100	100	100		100	DKK, CAPIL	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan Remaja	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	12	12	12	12		12	DKK D P M D	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang difasilitasi Dengan Pelayanan Ramah Anak	Puskesmas	Jumlah Puskesmas	12	12	12	12		12	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
			Jumlah Puskesmas difasilitasi Dalam Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Puskesmas	Jumlah Puskesmas	12	12	12	12		12	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (Puskesmas) terlatih KHA	Orang	Jumlah Tenaga Kesehatan	12	12	12	12		12	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi

16	Lingkungan Sehat	Peningkatan rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak serta Terwujudnya Kabupaten Sehat	Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Persentase %	Kualitas Air Minum	83	84	85	85		90	DKK dan/atau Dinas Lingkungan Hidup	Pengendalian dan Pengawasan Air Minum
			Persentase desa/ kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persentase %	Sanitasi	100	100	100	100		100	DKK dan/atau DPUPR	Pengendalian dan Pengawasan Sanitasi
			Presentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Persentase %	TPP	60	60	65	65		65	DKK	Pengendalian dan Pengawasan Sanitasi
			Persentase Tempat Dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan Pengawasan sesuai standar	Persentase %	TFU	87	88	89	89		90	DKK	Pengendalian dan Pengawasan Sanitasi
		Promosi Kesehatan	Persentase posyandu aktif	Persentase %	Posyandu	100	100	100	100		100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat	Sambungan Rumah	Data Layanan SPAM	38860	41360	43860	46360		48860	Perumda Air Minum	Penambahan Sumur Dalam dan Permukaan

			Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik	Data Layanan SPAM	465	475	485	495		505	Perumda Air Minum	Penambahan Sumur Dalam dan Permukaan
			Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik	Data Layanan SPAM	10	10	10	10		10	Perumda Air Minum	Penambahan Sumur Dalam dan Permukaan
			Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan perluasan SPAM	SR	Data Layanan SPAM	38860	41360	43860	46360		48860	Perumda Air Minum	Penambahan Cakupan Layanan
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis masyarakat	KK	Layanan Sanitasi	50	50	50	50		50	DLH dan/atau DPUPR	Pengendalian dan Pengawasan Sanitasi
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Mendapatkan layanan sistem pengelolaan air Limbah	KK	Layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	50	50	50	50		50	DLH dan/atau DPUPR	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK	Layanan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan	113	150	150	150		150	DLH dan/atau DPUPR	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	KK	Layanan Sistem Pengelolaan Persampahan	170960	179508	188483	197908		207803	DLH	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
		Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Forum Anak	Forum Anak	13	25	37	49		61	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P Sanitasi	Forum Keluarga	Forum Keluarga	13	25	37	49		61	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Implementasi KTR	Kecamatan, Desa/ Kelurahan Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kecamatan, Desa/ Kelurahan	Jumlah Lokasi	-	1	1	1		1	DKK	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Sosialisasi Bahaya Rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak	Forum Anak	20	200	200	740		920	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
V	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA												
18	Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun	Persentase %	Angka Partisipasi Kasar (APK)	94	95	96	97		98	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Mt/SDLB/ Sederajat	Persentase %	Angka Partisipasi Kasar (APK)	97	97	97	98		98	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMP LB/ Sederajat	Persentase %	Angka Partisipasi Kasar (APK)	81	81	81	82		82	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	Persentase %	Pendidikan Anak Usia Dini	81	81	82	82		82	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)	Satuan pendidikan	Sekolah	684	684	684	684		684	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah siswa Yang memperoleh KIP Dikdasmen	Orang	Kartu Indonesia Pintar	26843	26843	26843	26843		26843	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Jumlah Peserta Didik usia 3- 6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	Juta Orang	Penerima BOP PAUD	17980	17980	17980	17980		17980	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Kecamatan dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	Kecamatan		12	12	12	12		12	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	Kecamatan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	12	12	12	12		12	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Kecamatan dengan APK SD/MI/ SDLB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	12	12	12	12		12	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Kecamatan dengan APK SMP/MTs/ SMP LB sekurang- kurangnya 100%	Kecamatan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	12	12	12	12		12	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

		Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	Persentase %		100	100	100	100		100	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman	Persentase %		45	47	48	50		51	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
19	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Persentase Sekolah yang Ramah Anak	Persentase %	Sekolah Ramah Anak (SRA)	81	83	84	85		87	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Persentase Pembelajaran SMP TK/SMTK yang Ramah Anak	Persentase %	Sekolah Ramah Anak (SRA)	81	83	84	85		87	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Persentase Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang Ramah Anak	Persentase %	Sekolah Ramah Anak (SRA)	45	46	48	50		51	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang pemenuhan hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan	PAUD & TK	Sekolah Ramah	544	549	554	559		564	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
				SD	Anak (SRA)	444	448	450	455		460	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
				SMP		78	80	82	85		90	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

			SRA)	MI		5	6	7	8		9	KEMENAG	Pengelolaan Pendidikan
				MTS		1	1	1	1		1	KEMENAG	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	SD	Sekolah Ramah Anak (SRA)	444	448	450	455		460	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
				SMP		78	80	82	85		90	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
				MI		5	6	7	8		9	KEMENAG	Pengelolaan Pendidikan
				MTS		1	1	1	1		1	KEMENAG	Pengelolaan Pendidikan
			Penggiat SRA Terlatih (Fasilitator SRA)	Orang	Sekolah Ramah Anak (SRA)	264	270	274	278		284	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreatifitas dan budaya Anak	Kecamatan	Sekolah Ramah Anak (SRA)	12	12	12	12		12	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	Sekolah Ramah Anak (SRA)	12	12	12	12		12	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Promosi Pelaksanaan Kebijakan Kreativitas dan Budaya (Festival Kreativitas Anak)	kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan Kreativitas dan Budaya	5	5	5	5		5	DISARPUS	Pengelolaan Pendidikan

		Peningkatan Karakter Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Persentase %	Satuan Pendidikan	80	82	84	86		88	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak 5-6 tahun berada berkembang sesuai harapan	Persentase %		80	83	90	95		100	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Sekolah	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Arnan	Sekolah	Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	667	667	667	667		667	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Intervensi Keamanan pangan di sekolah (SD, SMP sederajat)	Tersedianya kantin sehat di sekolah	Persentase %	kantin sehat di sekolah	40	42	44	46		48	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Kecamatan	pendidikan pencegahan narkoba	12	12	12	12		12	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

		Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah	Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup	29	32	34	36		38	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah kecamatan yang menerapkan SPAB	Kecamatan	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	12	12	12	12		12	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
20	Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	Fasilitasi kreativitas Anak dan kegiatan budaya	Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreatifitas dan budaya Anak	Kecamatan	kreativitas Anak dan kegiatan budaya	12	12	12	12		12	DISPORA	Kreativitas Anak dan kegiatan budaya
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	kreativitas Anak dan kegiatan budaya	12	12	12	12		12	DISPORA	Kreativitas Anak dan kegiatan budaya
			Promosi Pelaksanaan Kebijakan Kreativitas dan Budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan	kreativitas Anak dan kegiatan budaya	300	360	420	480		540	DISDIKBUD	Kreativitas Anak

			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan formal dan non formal	Orang	Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan	50	100	150	200		250	DPPKBP3A	Pengendalian Penduduk
		Kegiatan Kreatifitas dan Budaya	Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kecamatan	kreativitas Anak dan kegiatan budaya	12	12	12	12		12	DISDIKBUD	Kreativitas Anak
		Kegiatan Kreatifitas dan Budaya	Jumlah Pojok Baca Digital yang terbangun dan terselenggara di daerah	Lembaga	kreativitas Anak dan kegiatan budaya	667	667	667	667		667	DISDIKBUD	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
		Fasilitasi Tempat Ibadah Ramah Anak	Jumlah Tempat Ibadah terfasilitasi Ramah Anak	Lokasi	Tempat Ibadah Ramah Anak	-	14	26	38		50	KEMENAG	Pengelolaan Tempat Ibadah

VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS												
21	a. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	Persentase %	kekerasan terhadap Anak	4,76	4,5	4	3,7		3,5	DPPKBP3A, POLRES, KEJAKSAAN, PENG. NEGERI	PHA dan/atau PKA
			Jumlah OPD yang telah menerbitkan kode etik bagi penyelenggara perlindungan Anak	OPD	kode etik bagi penyelenggara perlindungan Anak	40	40	40	40		40	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
			Jumlah kecamatan desa/ kelurahan yang diadvokasi tentang perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kecamatan	perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	12	12	12	12		12	DPPKBP3A, POLRES, DINSOS	PHA dan/atau PKA
			Jumlah kecamatan desa/ kelurahan terlatih internet aman untuk Anak	Kecamatan, Desa/ Kelurahan	internet kecamatan/ desa/ kelurahan	179	179	179	179		179	DISKOMINFO	Informasi dan Komunikasi Publik
			Jumlah desa/ kelurahan yang mencanangkan Desa/Kelurahan Tanpa kekerasan	Desa/ Kelurahan	Desa/Kelurahan Tanpa kekerasan	6	12	24	48		96	DPPKBP3A dan/atau DPMD	PHA dan/atau PKA

		Jumlah Desa/ Kelurahan yang mempunyai/ mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Desa/ Kelurahan	sistem pemantauan dan evaluasi perlindungan anak	6	12	24	48		96	DPPKBP3A dan/atau DPMD	PHA dan/atau PKA
		Jumlah SDM dan sarana/ prasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran	Orang	sarana/ prasarana yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran	12	20	25	30		35	DPPKBP3A dan/atau DINSOS	PHA dan/atau PKA
			Prasarana		0	0	1	1		1		
	Pelatihan bagi FA sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang memiliki FA sebagai 2P dalam mencegah KTA	Kecamatan Desa/ Kelurahan	Forum Anak	13	25	37	49		61	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Jumlah forum Anak (termasuk pendamping FA) yang terlatih dalam penyusunan profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus	FA	Forum Anak	13	25	37	49		61	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA

		Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD	Layanan UPTD	12	12	12	12		12	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
			Jumlah SDM unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Jumlah SDM	Layanan UPTD	2	4	8	10		12	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Wisata di Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Lainnya	Kecamatan	Kecamatan Sadar Wisata dan Sapta Pesona	12	12	12	12		12	DISPORA	PHA dan/atau PKA
			Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kecamatan, Desa/ Kelurahan	sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi	60	108	144	160		179	DPPKBP3A, UUPA POLRES	PHA dan/atau PKA
			Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kabupaten	sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi	3	6	6	9		12	GUGUS TUGAS KLA	PHA dan/atau PKA

			Jumlah desa/ kelurahan yang mencanangkan Perdesaan Wisata yang Ramah Anak Bebas Eksploitasi	Desa/ Kelurahan	Perdesaan Wisata yang Ramah Anak	6	7	8	8		9	DISDIKBUD	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media	KIE	7	7	8	8		9	DISHUB / DISKOMINFO	Informasi dan Komunikasi Publik
		Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan sunat Anak perempuan	Kecamatan Desa/ Kelurahan	Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	12	12	12	12		12	DKK	Kesehatan Anak
			Jumlah Remaja Anak (KGPPA) yang difasilitasi pencegahan sunat Anak	Orang	Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	-	20	30	35		40	DKK	Kesehatan Anak
			Jumlah Tokoh Agama yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	-	5	7	9		12	DKK	Kesehatan Anak
			Jumlah Tenaga Kesehatan yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	-	10	12	15		17	DKK	Kesehatan Anak

			Jumlah Tokoh Masyarakat yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	-	5	7	9		12	DKK	Kesehatan Anak
		Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan	Jumlah Tokoh Agama yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	-	5	7	9		12	DKK	Kesehatan Anak
			Jumlah Tokoh Masyarakat yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	-	5	7	9		12	DKK	Kesehatan Anak
			Jumlah Remaja yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	-	15	20	25		30	DKK	Kesehatan Anak
21	b. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja	Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak	pekerja Anak	-	-	-	-		-	DISPERNAKER	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Kerja
			Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA	Anak	pekerja Anak	-	-	-	-		-	DISPERNAKER	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Kerja
		Pencanangan zona bebas pekerja Anak	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang mencanangkan zona bebas pekerja Anak	Kecamatan Desa/ Kelurahan	pekerja Anak	12	12	12	12		12	DISPERNAKER	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Kerja

		Penanganan kasus pekerja Anak	Pekerja anak yang terlindungi hak-haknya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus	pekerja Anak	-	-	-	-		-	DISPERNAKER	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Kerja
		Pemeriksaan Penerapan Norma Perlindungan Pekerja Anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak	Perusahaan	pekerja Anak	20	25	30	35		40	DISPERNAKER	Hubungan Industrial
22	a. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	Korban penyalahgunaan Napza Anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada balai rehabilitasi sosial	Anak	pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	2	4	6	8		10	BAKESBANGPOL/ P4GN	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			Jumlah Anak penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi milik BNN	Orang	pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	2	4	6	8		10	BAKESBANGPOL/ P4GN	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

		Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Kecamatan	Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak	12	12	12	12		12	DISKOMINFO BAKESBANGPOL/P4GN	Informasi dan Komunikasi Publik
		Fasilitasi Pencegahan Pornografi	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan pencegahan bebas pornografi	Kecamatan	Pencegahan Pornografi	12	12	12	12		12	DISKOMINFO BAKESBANGPOL/P4GN SATPOL PP	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Desa/ Kelurahan Tanggap Ancaman Narkoba	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Kecamatan	Kecamatan Tanggap Ancaman Narkoba	12	12	12	12		12	DPPKBP3A UUPA POLRES DINSOS DKK BAKESBANGPOL/P4GN DPMD	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
22	b. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan	penanganan korban dan pengungsi	0	0	0	0		0	DPPKBP3A BPBD	Penanggulangan Bencana
		Fasilitasi desa/kelurahan tangguh bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dikembangkan	Desa/ Kelurahan	desa/kelurahan tangguh bencana	1	1	1	1		1	DPMD BPBD	Penanggulangan Bencana
		Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak	edukasi bencana	500	500	500	500		500	DISDIKBUD BPBD	Penanggulangan Bencana

Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	Daerah	Penanganan Anak korban bencana dan konflik	1	1	1	1		1	DPPKBP3A BPBD BAKESBANGPOL	Penanggulangan Bencana
	Jumlah orang yang difasilitasi pemberian Bantuan spesifik Anak tentang perlindungan anak dari bencana	Orang	Penanganan Anak korban bencana dan konflik	-	-	-	-		-	DPPKBP3A BPBD BAKESBANGPOL	Penanggulangan Bencana
Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	Persentase %	Penanganan Anak korban bencana dan konflik	-	-	-	-		-	BPBD DINSOS	Penanggulangan Bencana
Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan	Penanganan Anak korban bencana dan konflik	-	-	-	-		-	BPBD DINSOS	Penanggulangan Bencana
Peningkatan Ketahanan Iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen	Ketahanan Iklim	1	1	1	1		1	BPBD DLH	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

			Jumlah desa berketahanan iklim	Desa	Ketahanan Iklim	167	167	167	167		167	BPBD DLH	
23	a. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak penyandang disabilitas	Kecamatan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan	12	12	12	12		12	DINSOS	Perlindungan Sosial
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum	Jumlah Forum Koordinasi	1	1	1	1		1	DINSOS	Perlindungan Sosial
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas dan terisolasi	Media	Media KIE	-	-	-	-		-	DINSOS	Perlindungan Sosial

			Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan perlindungan Anak berkebutuhan khusus	Lembaga	Jumlah Lembaga	12	12	12	12		12	DINSOS	Pemberdayaan Sosial
			Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus	Kecamatan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan	12	12	12	12		12	DINSOS	Perlindungan Sosial
23	b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Fasilitasi perlindungan Anak PSM	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan Anak PSM	Kecamatan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan	2	4	6	8		12	DINSOS	Pemberdayaan Sosial
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM	Forum	Jumlah Forum Koordinasi	1	1	1	1		1	DINSOS	Pemberdayaan Sosial

			Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, terutama bagi Anak PSM	Media	Media KIE	12	12	12	12		12	DINSOS	Pemberdayaan Sosial
24	Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	6	6	6	6		6	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA
			Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat penyidikan	Orang	Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (ABH)	19	17	15	13		10	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA
		Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi Anak	LPKA	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	6	6	6	6		6	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA

		Persentase ABH yang memperoleh layanan hak integrasi	Orang	Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (ABH)	19	17	15	13		10	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA
		Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	6	6	6	6		6	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA
	Penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di Kabupaten	Lembaga	LPKS dan RPS	-	1	1	2		2	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA
	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan Forum koordinasi penanganan ABH	kegiatan	Forum Koordinasi	19	17	15	13		10	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA
		Peningkatan kapasitas APH	APH	Jumlah APH	6	6	6	6		6	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA

		Fasilitas penyediaan infrastruktur ramah Anak	Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai Standar Pelayanan Minimal (pilot project)	Lokasi	Unit PPA	1 (Unit PPA)	1 (Unit PPA)	1 (Unit PPA)	1 (Unit PPA)		1 (Unit PPA)	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA
24	Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Fasilitas penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	Jumlah kegiatan Forum koordinasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme di pusat dan provinsi	Kabupaten	1	1	1	1	1		1	BAKESBANGPOL	Perlindungan Khusus Anak

